



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BLITAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan **"RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025"**.

RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. RENJA Tahun 2025 ini merupakan acuan untuk perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA Tahun 2025 ini. Kami menyadari RENJA ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan RENJA selanjutnya.

Akhirnya semoga RENJA Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2024

KEPALA DINAS

P3APPKB

KABUPATEN BLITAR



Drs. M. HANKAM INDORO, M. SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670929 199202 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB	32
2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD	73
3.3 Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	120
BAB V PENUTUP.....	128





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

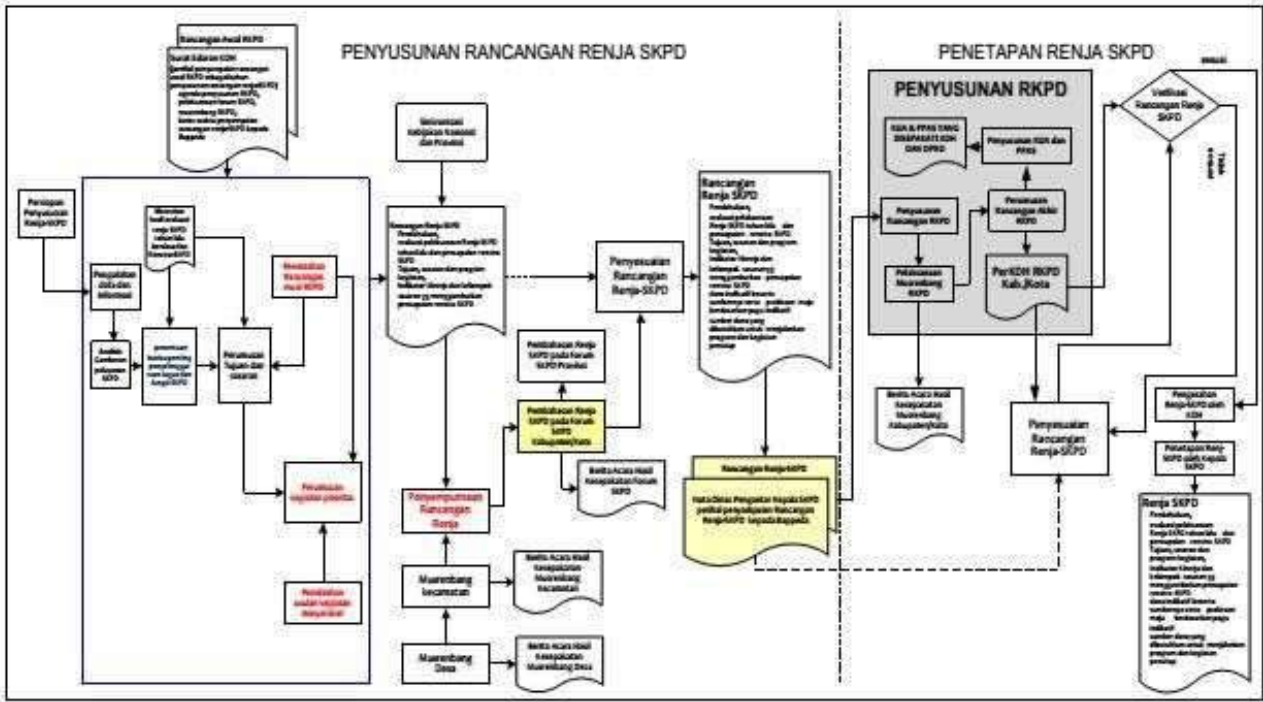
Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD). Proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan SKPD yang mengampu 2 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik , maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin



hubungan yang harmonis, baik secara vertikal dan horisontal maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada tema, prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RENJA SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- 
- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- 
- Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
25. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
27. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 30. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 31. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 32. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 33. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 34. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENJA SKPD Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini disusun dengan menyesuaikan tujuan dan fungsi Dinas P3APPKB. Maka tujuan disusunnya Renja SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025



atau sumber dana lainnya. Menempatkan sasaran program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur Dinas P3APPKB.

2. Konsistensi dalam peningkatan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
4. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD.
5. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program SKPD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang terimplementasi.
6. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) 3 SKPD Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 138 ayat (1) mengenai Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan

Awal RKPD Berisi uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku



kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Sub Bab ini berisi factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rancangan RKPD dan dituangkan dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.



BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, yaitu :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yaitu Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur), maka Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, maka Dinas P3APPKB mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026, guna mendukung pencapaian misi tersebut, maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran SKPD yang dituangkan pada Renstra SKPD.

Secara umum Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik

Sebagaimana tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan sesuai dengan program, maka Dinas P3APPKB Kabupaten pada tahun 2024 melaksanakan 10 program, dan dijabarkan ke dalam 22 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan . Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2:08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2:08:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88	88	88	100	1.14	88	277.09	69.27

2.08 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	1.00	100	300	75
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	2	2	2	1.00	3	7	1.75
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1.00	1	3	0.75
2.08 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	1.00	100	301.33	75.33
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	24	23	0.96	24	74	18.5
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	13	61	61	1.00	100	126	31.5
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1	1	1	1.00	12	14	3.5
2.08 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	80	80	100	1.25	80	260	65
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	21	21	21	1.00	20	62	15.5

2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	2	3	3	1.00	3	8	2
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	3950	1	1	1.00	1	3952	988
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	70	70	70	1.00	80	220	55
2.08 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia			0	0	0.00	1	1	0.25
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0	0.00	1	1	0.25
2.08 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	80	80	80	1.00	80	264.54	66.14
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1.00	12	36	9
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1.00	12	36	9
2.08 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	80	80	80	1.00	80	250.19	62.55

2.08 . 01 . 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	12	12	12	1.00	7	31	7.75
2.08 . 01 . 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	12	12	12	1.00	7	31	7.75
2:08:02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70.65	3.81	71.72	71.8	1.00	70.25	129.13	32.28
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.85	2.67	3.65	4.8	1.32	3.75	6.42	1.61
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31.3	22.9	30.65	27.31	0.89	31.05	53.95	13.49
2.08 . 02 . 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	95	50.98	85	50.9	0.60	90	206.31	51.58
2.08 . 02 . 2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	31	0	0	0	#DIV/0!	307	427	106.75
2.08 . 02 . 2.01.0008	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	274	0	0	0	#DIV/0!	150	521	130.25

2.08 . 02 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	330	50	310	350	1.13	320	1820	455
2.08 . 02 . 2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	4	50	1	1	1.00	4	55	13.75
2:08:03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6.01	4.69	6.07	4.17	0.69	6.02	14.91	3.73
2.08 . 03 . 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani	100	29	100	100	1.00	100	155	38.75
2.08 . 03 . 2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	100	1	1	1.00	1	104	26
2.08 . 03 . 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	95.7	93.1	92	100	1.09	93.35	279.04	69.76

2.08 . 03 . 2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	26	3	26	26	1.00	26	55	13.75
2.08 . 03 . 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	17.74	31.9	12.09	12.09	1.00	14.91	59.31	14.83
2.08 . 03 . 2.03.02	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		23	0	0	#DIV/0!		23	5.75
2.08 . 03 . 2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	37	22	1	1	1.00	37	63	15.75
2:08:04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	16	49.2	25.04	31.03	1.24	14	88.24	22.06
2.08 . 04 . 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	900	20	800	4315	5.39	850	870	217.5

2.08 . 04 . 2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		20	1	1	1.00		20	5
2:08:05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Prosentase Data Sektoral Terpilah yang Valid	100	100	100	100	1.00	100	300	75
2.08 . 05 . 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100	100	100	100	1.00	100	300	75
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	2	1	1	1.00	1	4	1
2:08:06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori KLA	Utama	Nindya	Nindya	Nindya	1.00	Utama	Utama	Utama
2.08 . 06 . 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100	80	100	100	1.00	100	280	70
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Nindya	4	4	1.00	1		

2:08:07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	100	100	100	1.00	100	300	75
2.08 . 07 . 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74	51	90.62	100	1.10	92	186	46.5
2.08 . 07 . 2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		2	0	0	#DIV/0!	200	5	1.25
2.08 . 07 . 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	92	94.14	90.62	100	1.10	92	279.16	69.79
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	78		82	70	0.85	78	78	19.5
2.08 . 07 . 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	14.91	31.85	12.09	12.09	1.00	14.91	59.26	14.82

2.08 . 07 . 2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		1	0	0	#DIV/0!	150	2	0.5
2.08 . 07 . 2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			0	0	#DIV/0!	9	1	0.25
2:14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						#DIV/0!			
2:14:02	Program Pengendalian Penduduk	MUKP	21	18.8	19.4	23	1.19	20.6	62.4	15.6
2.14 . 02 . 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	0	1	1	1.00	2	3	0.75
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan			1	1	1.00		1	0.25
2.14 . 02 . 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2	1	2	2	1.00	2	5	1.25

2.14 . 02 . 2.02.0012	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1			#DIV/0!		1	0.25
2.14 . 02 . 2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB			12	12	1.00		12	3
2.14 . 02 . 2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencan						#DIV/0!			
2:14:03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ASFR	9.05	8.42	9.82	6.2	0.63	9.24	23.86	5.97
		Unmetneed	7.89	7.99	15.56	23.6	1.52	8	39.59	9.9
2.14 . 03 . 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	3	10	10	1.00	10	23	5.75
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	6	4	4	1.00	4	14	3.5
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	19	22	22	1.00	22	63	15.75

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	6	9	5	0.56	12	23	5.75
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.00	4	12	3
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	4	4	1	0.25	4	9	2.25
2.14 . 03 . 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100	100	100	100	1.00	100	300	75

2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744	744	744	744	1.00	744	2232	558
2.14 . 03 . 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100	100	100	100	1.00	100	300	75
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	12	12	1.00	12	36	9
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814	38.63	7465	7320	0.98	7814	15172.63	3793.16
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7				#DIV/0!	7	7	1.75
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	4	1	1	1.00	1	6	1.5

2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		2			#DIV/0!		2	0.5
2.14 . 03 . 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80	100	80	80	1.00	80	260	65
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	37	37	37	37	1.00	37	111	27.75
2:14:04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	IPK	52.42	51.11	51.11	56.1	1.10	51.97	159.18	39.795
2.14 . 04 . 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	82	70	80	81	1.01	82	233	58.25

2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	22		1	1	1.00	22	23	5.75
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20				#DIV/0!	20	20	5
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60169		2829	2829	1.00	60169	62998	15749.5



Berdasarkan data pada tabel 2.1. dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2021 dan tahun 2023 adalah masa transisi program dan kegiatan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat pemutakhiran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB pada tahun 2025.

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2024 Dinas P3APPKB telah melaksanakan 10 Program, 28 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan, pada saat penyusunan dokumen ini realisasi program dan kegiatan masih belum dapat disimpulkan secara pasti karena program dan kegiatan berikut sub kegiatan sedang berjalan, namun kami optimis untuk dapat merealisasikan seluruh target baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang berjalan.

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penurunan Kategori APE (Anugrah Parahita Ekapraya) yang sebelumnya Madya menjadi Pratama dikarenakan adanya metode penilaian yang berbeda.
- Peningkatan permohonan rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak yang pada tahun 2023, jika pada tahun 2022 terdapat 167 pengajuan maka pada tahun 2023 ini terdapat 229 Pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan rekomendasi perkawinan anak. Terdapat 229 pasang calon pengantin (458 orang) dimana 362 diantaranya adalah calon pengantin yang berada pada usia anak, dengan keterangan 177 anak di kabulkan, 114 anak ditolak dan 71 anak ditunda.

- Peningkatan ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) sebesar 32,7% disebabkan tingginya kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar.
- Peningkatan angka *Unmet-Need* berkebutuhan ber-KB berdasarkan infografik kinerja utama Bangga Kencana yang dirilis oleh BKKBN RI *Unmet Need* Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 15.8%. Pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka *Unmet Need* ini.
- Perubahan mekanisme pelaporan progres data ke sistem New SIGA terdapat beberapa kendala dalam operasional pelaksanaannya.
- Prevalensi kontrasepsi modern (m-CPR/*Modern Contraceptive*) menyentuh angka realisasi sebesar 68,03% walaupun belum dapat memenuhi target yang ditentukan sebesar 79,41%. Hal ini dikarenakan kecil kemungkinan sebesar 100% pasangan usia subur menggunakan alat dan obat kontrasepsi dikarenakan faktor kehamilan, nifas dan yang melaksanakan kontrasepsi tradisional.
- Rendahnya persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah maupun di swasta disebabkan banyaknya persyaratan lapangan pekerjaan yang sulit dipenuhi oleh Perempuan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Pencapaian prestasi kerja Dinas P3APPKB pada Tahun 2023 dengan Pemberian Penghargaan, sebagai berikut:

1. Penghargaan Penurunan Stunting sebagai bentuk Apresiasi BKKBN RI Kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Komitmen menurunkan angka prevalensi stunting.
2. Penghargaan Pencapaian Pelayanan KB 139,77% dalam Rangka *World Contraception Day* Tahun 2023 sebagai bentuk Apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pencapaian Pelayanan KB.
3. Penghargaan atas terbentuknya 248 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar sebagai Bentuk Apresiasi Kepada



Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pencapaian pembentukan 248 Desa dan Kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

4. Apresiasi Pelaksana Terbaik I Verifikasi, Validasi Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 sebagai Apresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur atas Validnya Data Keluarga Berisiko Stunting.

Dengan pencapaian Prestasi dan terlaksananya program serta kegiatan memberikan implikasi peningkatan dedikasi kerja sumber daya manusia sehingga program atau kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan terpenuhinya target kinerja.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dengan meningkatkan koordinasi sumber daya manusia guna mengoptimalkan pelaksanaan Program atau Kegiatan sehingga target Program atau Kegiatan dapat tercapai. Peningkatan koordinasi sumber daya manusia juga diperlukan untuk relevansi antara Program dengan Pagu Anggaran sehingga pada akhirnya tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Blitar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama tahun 2023 dan proyeksi s.d tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3APKB Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Indeks Pemberdayaan Gender	74,18	80,05	78,85	78,95	80,05	80,15	81,32	80,15	80,15	80,25	Realisasi melebihi target
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,95	-	3,51	3,65	3,75	3,85	4,8	4,8	3,85	3,95	Realisasi melebihi target
3	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	31,45	-	30,55	30,65	31,05	31,30	27,31	27,31	31,30	31,45	Realisasi belum sesuai target
4	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	88,25	-	87,64	87,76	87,95	88,15	52,25	N/A	88,15	88,25	Data tahun 2024 belum rilis
5	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	93,15	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi sesuai target
6	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	98,80	-	90,62	92,10	93,35	95,70	100	100	95,70	98,80	Realisasi melebihi target

7	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	94,00	-	90,62	90,62	92,00	93,00	100	100	93,00	94,00	Realisasi melebihi target
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	-	2	2	2	2	1,98	N/A	2	2	Realisasi belum sesuai target, data tahun 2024 belum rilis
9	Rasio akseptor KB	14,19	-	14,15	14,16	14,17	14,18	15,14	15,4	14,18	14,19	Realisasi melebihi target
10	Indeks Pembangunan Keluarga (I bangga)	61,00	-	51,11	51,58	51,97	52,42	61,15	61,15	52,45	52,66	Realisasi melebihi target



Pelaksanaan kegiatan di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan melebihi target antara lain karena :

1. Adanya Undang – undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga komitmen Pemerintah terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga semakin tinggi untuk revitalisasi Program KB.
2. Adanya dukungan dari mitra kerja dan Dinas instansi terkait untuk mendukung program dari Dinas P3APPKB baik yang terkait pengendalian penduduk, Keluarga Berencana serta mendukung pencapaian sasaran MDGs.
3. Koordinasi dengan Kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Blitar.

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar sampai pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan penurunan jumlah penduduk.

Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan bahwa untuk urusan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka tugas dan



fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah merumuskan kebijakan teknis.

Kabupaten Blitar dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPPA Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas P3AK dan BKKBN Propinsi Jawa Timur
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, tentunya banyak permasalahan yang dihadapi baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan sekretariat untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah.
2. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
5. Tingginya Unmet-Need kebutuhan ber-KB.
6. Peningkatan permohonan rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak yang pada tahun 2023, jika pada tahun 2022 terdapat 167 pengajuan maka pada tahun 2023 ini terdapat 229 Pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan rekomendasi perkawinan anak.
7. Peningkatan ASFR (Age Specific Fertility Rate) disebabkan



tingginya kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar.

8. Kurangnya kegiatan momentum yang berkaitan dengan pembebasan biaya pemasangan KB Khususnya metode MKJP.
9. Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan melihat isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, maka dapat dilakukan penyusunan strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kuantitas maupun kualitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.
3. Optimalisasi pembinaan terhadap petugas lapangan dalam rangka mendapatkan data yang valid melalui pendataan keluarga dari rumah ke rumah. Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran dan kemampuan dari petugas lapangan dalam hal ini kader di desa masih tergolong rendah. Salah satu diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan kader untuk menerapkan pengumpulan data yang benar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap PLKB serta melibatkan PPKBD dan kader untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pendataan keluarga, melalui pelatihan dan sosialisasi.
4. Meningkatkan KIE kepada sasaran *Unmet-Need* melalui kegiatan kelompok yg ada di masyarakat dan mengoptimalkan kader yang ada di desa untuk melakukan penyuluhan agar meminimalisir jumlah unmetneed yang ada serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat dalam hal kegiatan safari KB di tempat pelayanan



yang ada.

5. Meningkatkan kualitas petugas lapangan melalui bimbingan dan pembinaan secara berkala kaitannya dengan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya kaum wanita melalui pendidikan bimtek dan sosialisasi, seperti di kelompok PKK, GOW Fatayat, Aisyah dan Muslimat.
7. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui pembinaan serta evaluasi kecamatan, desa, kelurahan layak anak. Mengikutkan forum anak dalam musrenbang juga musrendes. Merangkul semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk semua kegiatan harus responsif anak.
8. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua atau wali tentang penyadaran hukum terhadap peran perempuan dan hak-hak anak serta memberikan pelayanan maximal secara kuantitatif & kualitatif kepada perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Program di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar berusaha dilaksanakan sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Blitar, Provinsi maupun Nasional di antaranya :

1. Program Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan Transparan mengingat saat ini sudah ada keterbukaan publik, Semua kegiatan bisa di akses masyarakat secara online. Kondisi ini juga akan dapat meningkatkan motivasi kerja bagi Aparatur Dinas P3APPKB.
2. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilaksanakan dengan memanfaatkan jejaring yang ada baik dari Dinas Terkait, Institusi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun Lintas Sektor.
3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan dengan berbagai inovasi dan dukungan dari semua unsur yang ada di masyarakat.
4. Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak, Dinas P3APPKB terus berusaha untuk meningkatkan keterlibatan dari berbagai instansi organisasi perempuan dan anak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan SKPD telah terakomodir didalamnya.

Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik Domestik maupun Regional, Asean maupun Internasional.

Dalam RKPD Kabupaten Blitar terdapat 4 (empat) Program yang menjadi tanggungjawab Dinas P3APPKB adalah Prioritas “**Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial**”, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4. Program Perlindungan Perempuan

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar maka pada tahun 2025 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tahun 2025 dimana didalamnya terdapat 10 program, dan dijabarkan ke dalam 24 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kabupaten Blitar - Provinsi
Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program /		Indikator	Target	Pagu	Program /		Indikator	Target	Kebutuhan	Catatan
Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	Dana	Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL PAGU				18,838,752,000	TOTAL PAGU					18,838,752,000.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88	4,109,294,759	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88	4,000,321,671	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	2,190,659	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	2,792,700	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	1,314,018.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	2,053,800.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	876,641.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	738,900.00	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	3,216,655,612	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	2,987,517,171	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3,201,562,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2,955,026,671.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	14,040,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	30,300,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1,053,612.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	2,190,500.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	113,118,937	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	216,622,335	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	19,269,378.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	59,878,150.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	19,950,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	11,843,185.00	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	7,955,259.00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	11,843,185.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	65,944,300.00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	144,901,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	175,000,000.00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	175,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	175,000,000.00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	175,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	534,159,024		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	542,002,576	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	61,309,644.00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	75,749,644.00	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	472,849,380.00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	466,252,932.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	68,170,527		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	76,386,889	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	51,643,527.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	64,311,889.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	12,075,000.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	12,075,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	4,452,000.00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	4,452,000.00	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70.25	561,401,418		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70.25	292,000,000	

		2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.75					2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.75		
		3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31.05					3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31.05		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	90	40,000,255		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	90	246,000,000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	31	32,965,823.00		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	307	200,000,000.00	

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	274	7,034,432.00		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150	46,000,000.00	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	320	521,401,163		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	320	350,000,000	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	521,401,163.00		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	350,000,000.00	

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6.02	324,978,082.00		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6.02	167,251,012.00	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani	100	99,000,064		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani	100	77,517,522	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	99,000,064.00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	77,517,522.00	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	93.35	34,727,960		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	93.35	71,733,490	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26	34,727,960.00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26	71,733,490.00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	14.91	191,250,058		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	14.91	18,000,000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	37	191,250,058.00		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	37	18,000,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	14	17,468,961.00		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	14	13,500,000.00	

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	850	17,468,961		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	850	13,500,000	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	17,468,961.00		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	13,500,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100%	28,598,592		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100%	30,000,000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100%	28,598,592		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100%	30,000,000	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	28,598,592.00		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	30,000,000.00	

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Kategori KLA	Utama	283,765,439		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Kategori KLA	Utama	3,000,000	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100%	212,624,513		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100%	3,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	169,266,225.00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3,000,000.00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100%	191,037,608.00		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100%	387,186,988.00	
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				66,148,308.00	
						Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	200	66,148,308.00	

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	92	65,272,008.00		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	92	169,184,510.00	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	78	65,272,008.00		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		dalam pelaksanaan kebijakan	78	169,184,510.00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	14.91	125,765,600		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	14.91	151,854,170	
						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	150	32,854,170	
						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	9	119,000,000	

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2	125,765,600.00		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2	125,765,600.00	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Median Usia Kawin Pertama	20.6	50,000,141.00		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Median Usia Kawin Pertama	20.6	672,350,000.00	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	21,457,400.00		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	128,000,000.00	
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan	1	128,000,000.00	

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3	21,457,400.00		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3	21,457,400.00	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2	28,542,741.00		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2	544,350,000.00	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		333,600,000.00	
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB		198,000,000.00	
						Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana				12,750,000.00	

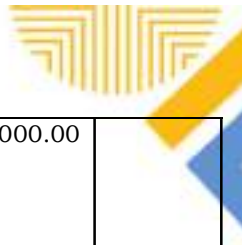
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	22,343,028.00		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	22,343,028.00	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	6,199,713.00		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	6,199,713.00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		ASFR	9.24	6,941,307,000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		ASFR	9.24	5,854,574,350	
		Unmet Need	8					Unmet Need	8		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	1,616,700,000		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	1,878,000,000	
Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4			Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	140,000,000.00	

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	980,700,000.00		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	1,121,200,000.00	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	411,600,000.00		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	330,000,000.00	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4	150,000,000.00		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4	86,800,000.00	

Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	31,440,000.00		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	200,000,000.00	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100%	500,000,000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100%	682,000,000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744	496,000,000.00		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744	682,000,000.00	

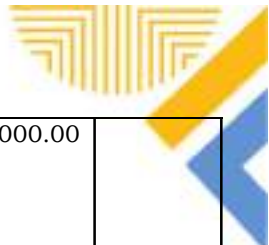
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	744	4,000,000.00		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	744	4,000,000.00	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100%	4,242,107,000		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100%	2,750,574,350	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	38,700,000.00		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	39,600,000.00	

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814	2,533,188,000.00		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814	2,584,281,000.00	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7	1,647,719,000.00		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7	102,693,350.00	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	22,500,000.00		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	15,000,000.00	
						Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	70	9,000,000.00	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80%	582,500,000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80%	544,000,000	



Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	14,180,000.00		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	14,180,000.00	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	37	568,320,000.00		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	37	544,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		IPK	51.97	6,330,900,000.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		IPK	51.97	6,193,900,000.00	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	82	6,330,900,000.00		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	82	6,193,900,000.00	

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	22	30,000,000.00		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	22	3,000,000.00	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20	360,000,000.00		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20	300,000,000.00	



Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60169	5,940,900,000.00		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60169	5,890,900,000.00	
---	--	---	-------	------------------	--	---	--	---	-------	------------------	--



Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dikatakan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam pemilihan sub kegiatan disebabkan karena terdapat amanat dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas RKPD pada Tahun 2025 serta amanat dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada Tingkat Dinas P3APPKB. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan Sosialisasi dan Penyuluhan.

Proses usulan program atau kegiatan dilakukan dari bawah didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang tingkat RT, RW dan Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing- masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing-masing perwakilan dari Kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada Tingkat Dinas P3APPKB.

Pada tahun 2025 Dinas P3APPKB turut andil pada Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan munculnya usulan untuk Program Pengarusutamaan Gender (PUG), Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Khusus Anak.

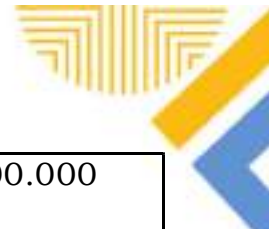
Tabel 2.4
Usulan Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Blitar

Nama SKPD : DP3APPKB

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR/KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
1	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga	Dsn Jabung RT 04 RW 02, Kec. Talun, Kab. Blitar	Pelaksanaan Komunikasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	Rp 13.500.000
2	Sosialisai Pencegahan Perkawinan Anak	Dusun Tembalang, Dusun Galor, Kec. Wlingi, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp 13.500.000
3	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak	Desa Jambepawon Kec Doko, Kab Bitar, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp 13.500.000
4	Bimtek Menuju Perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Jln Supriadi No. 06 Rt. 04 Rw. 03 Dusun Resapombo Desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	50 orang	Rp 18.000.000



5	Bimtek Kelompok Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PENA INTAN)	Dsn. Darungan Rt 01 Rw 03 Desa Darungan Kec. Kademangan Kab. Blitar, Kec. Kademangan, Kab Blitar	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	50 orang	Rp 18.000.000
6	Sosialisasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum	Dusun Tuliskriyo RT 01 RW 02 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp13.500.000
7	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Dusun Boro RT 02 RW 05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp. 13.500.000
8	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan	Dusun Sendang RT 004 RW 003 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	Rp 18.000.000
9	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak	Dusun Sumberjo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp 13.500.000



10	Bimtek Menuju Perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Kantor Kepala Desa Tegalrejo RT. 05 RW. 04 Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot	50 orang	Rp. 18.000.000
11	Sosialisasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum	Desa Tumpakoyot, Kec. Bakung, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp. 13.500.000
12	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Dusun Panggungwinong, Sumberagung, Kec. Gandusai, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp. 10.000.000
13	Bimtek Menuju Perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Desa Tawangrejo, Kec. Binangun, Kab. Blitar	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot	50 orang	Rp. 10.000.000
14	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Desa salamrejo, Kec. Binangun, Kab. Blitar	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	Rp. 10.000.000
Total			Rp. 196.500.000,00		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam RPJMN 2021-2026, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Mandiri, Maju Adil, dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Di Berbagai Wilayah Yang Didukung Oleh SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing”.

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2021-2026 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2021-2026.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2021-2026 yaitu :

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2025.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2025.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2025.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2025.

- 
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2021 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2025.
 - 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2021 dan menjadi 22,1 tahun pada 2025.

Kebijakan nasional bidang kependudukan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
- b. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
- d. Meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
- e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi.

Arah kebijakan dan strategi tahun 2020-2025 yang akan ditempuh KemenPPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra KemenPPPA adalah sebagai berikut:

Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaangender di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program,



kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;

- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program pembangunan^[1] dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

1. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan



kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak;

- b. Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada *day care*/Tempat Penitipan Anak;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya, melalui peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program pembangunan^[1] dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan



perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan

- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara KemenPPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerjasama antara KemenPPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- c. Peningkatan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
- d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
- e. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah



tentang pentingnya sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan

- f. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam mengasuh dan melindungi anak dan orang tua guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan, melalui gerakan sayang keluarga dan mengoptimalkan kelembagaan PKK, dasawisma, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

3. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- d. Memperkuat sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

- 
- e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus berjalan dengan baik;
 - f. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan sertifikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO, dan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA; dan
 - g. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

4. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- c. Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan baik di pusat dan daerah;
- d. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan



standar pelayanan UPTD PPA, dan serifikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

- e. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.

5. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, pentapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dan provinsi, serta berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar 2025, maka ditetapkan tujuan strategis rencana kerja SKPD Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut **“Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berpihak Pada Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja SKPD tahun 2025 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan SKPD melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang Berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang berkualitas.
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan unmetneed, dengan upaya peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas dan upaya peningkatan ketahanan keluarga.
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penanganan perlindungan perempuan dan anak serta Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak (PUG & PUHA) dan pemberdayaan perempuan.
5. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selain itu Dinas P3APPKB juga turut serta mewujudkan keenam misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025 yang meliputi:

- a. Misi I : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
- b. Misi II : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar



yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.

- c. Misi III : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.
- d. Misi IV : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar memiliki tugas dan fungsi serta berperan dalam mendorong tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Blitar.

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dari visi misi tersebut terperinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur)			
Misi : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berpihak pada Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Meningkatnya Pelayanan kesekretariatan SKPD melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana. b. Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan penganggaran pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang tepat.	1)Menguatkan kapasitas SDM melalui Bimtek dan Pelatihan 2).Meningkatkan kinerja kelembagaan melalui pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kapasitas aparatur 3).Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan kuantitas kinerja	1) Menjamin terpenuhinya sarana prasarana 2) Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian dan kedisiplinan 3) Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan



	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penanganan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak dan pemberdayaan perempuan	1) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring	1) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan
--	--	---	--



Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur)			
Misi : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender 2) Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 3) Menyusun, mereview, mengharmonisasi k an dan	n gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG. 2) Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan. 3) Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana



		mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. · Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 4) Memperkuat mekanisme	Perdagangan Orang 4) Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk
--	--	--	---



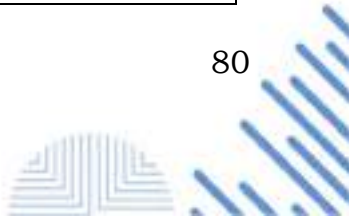


Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur)			
Misi : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan	menunjang pelayanan Perlindungan perempuan Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/ Kota Layak Anak. 5) Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan





		bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 5) Menyusun, mereview, mengharmoniskan, dan mengkoordinasikan , berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. · Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. · Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan	fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak, penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.
--	--	--	--





Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur)			
Misi : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan anggaran yang peduli anak. · Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. · Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. · Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak	





	Mengendalikan LPP melalui penurunan unmeetned dengan upaya peningkatan kesertaan berKB yang berkualitas dan upaya peningakatan ketahanan keluarga	1) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender 2) Peningkatan Rata- Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE 3) Peningkatan kualitas pelayanan KB 4) Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1) Peningkatan penyusunan datagender dan anak menggunakan SIGA 2) Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan 3) Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 4) Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
--	---	---	---

3.3. Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB

Rencana 10 Program, 24 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan Dinas P3APPKB Kab. Blitar yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

- **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
 - b. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

- **Program Perlindungan Perempuan**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah



Kabupaten/Kota.

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

1. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Program Perlindungan Khusus Anak**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - b. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

- **Program Pengendalian Penduduk**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

- **Program Pembinaan Keluarga Berencana**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - a. Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - e. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di



Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - e. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

- **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang



akan dicapai Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Misi II RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026 yaitu, Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026, RKPD Tahun 2025 dan Renstra Dinas PPKB P3A di tampilkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN BLITAR

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL PAGU				18,838,752,000				18,838,752,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah		88	4,109,294,759	DAU		88	4,109,294,759



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan		100	2,792,700			100	2,190,659
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun		3	2,053,800.00			3	1,314,018.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	738,900.00			1	876,641.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel		100	2,987,517,171			100	3,216,655,612

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24	2,955,026,671.00			24	3,201,562,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	30,300,000.00			100	14,040,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12	2,190,500.00			12	1,053,612.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel		80	216,622,335			80	113,118,937
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20	59,878,150.00			35	19,269,378.00



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	11,843,185.00			1	7,955,259.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80	144,901,000.00			85	65,944,300.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	175,000,000.00			1	175,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	175,000,000.00			1	175,000,000.00



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu		80	542,002,576			80	534,159,024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	75,749,644.00			12	61,309,644.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	466,252,932.00			12	472,849,380.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		80	76,386,889			80	68,170,527

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7	64,311,889.00			7	51,643,527.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7	12,075,000.00			7	12,075,000.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		70.25	292,000,000	DAU		70.65	561,401,418
		2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		3.75				3.85	

		3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		31.05				31.3	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG		90	246,000,000			95	40,000,255
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		307	200,000,000.00			31	32,965,823.00
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		150	46,000,000.00			274	7,034,432.00

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		320	350,000,000			330	521,401,163
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		4	350,000,000.00			4	521,401,163.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)		6.02	324,978,082.00			31.3	324,978,082.00



	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani		100	77,517,522			100	99,000,064
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1	77,517,522.00			1	99,000,064.00



	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan		93.35	71,733,490			95.7	34,727,960
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		26	71,733,490.00			25	34,727,960.00



	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi		14.91	18,000,000			17.74	191,250,058
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		37	18,000,000.00			36	191,250,058.00



	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak		14	13,500,000.00			16	17,468,961.00
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga		850	13,500,000			900	17,468,961

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1	13,500,000.00			1	17,468,961.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid		100%	30,000,000			100	28,598,592
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid		100%	30,000,000			100	28,598,592
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1	30,000,000.00			1	28,598,592.00

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori KLA		Utama	3,000,000			Utama	283,765,439
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA		100%	3,000,000			100	212,624,513
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	3,000,000.00			6	169,266,225.00



	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait		100%	387,186,988.00			100	191,037,608.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				66,148,308.00				
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		200	66,148,308.00				



	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten		92	169,184,510.00			74	65,272,008.00
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		78	169,184,510.00			75	65,272,008.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi		14.91	151,854,170			17.74	125,765,600



	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		150	32,854,170				
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		9	119,000,000			2	125,765,600.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama		20.6	672,350,000.00	DAU		21	50,000,141.00



	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi		2	128,000,000.00			2	21,457,400.00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan		1	128,000,000.00			3	21,457,400.00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid		2	544,350,000.00			2	28,542,741.00

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1	333,600,000.00			1	22,343,028.00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB		1	198,000,000.00			1	6,199,713.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				12,750,000.00				
	PROGRAM PEMBINAAN	ASFR		9.24	5,854,574,350	DAU/DAK		9.05	6,941,307,000



	KELUARGA BERENCANA	Unmet Need		8				7.89	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		10	1,878,000,000			10	1,616,700,000
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4	140,000,000.00			4	42,960,000.00



	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		22	1,121,200,000.00			22	980,700,000.00
--	---	---	--	----	------------------	--	--	----	----------------



	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		12	330,000,000.00			12	411,600,000.00
--	--	--	--	----	----------------	--	--	----	----------------



	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		4	86,800,000.00			4	150,000,000.00
--	---	---	--	---	---------------	--	--	---	----------------



	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4	200,000,000.00			4	31,440,000.00
--	---	---	--	---	----------------	--	--	---	---------------



	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)		100%	682,000,000			100	500,000,000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		744	682,000,000.00			744	496,000,000.00



	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi		100	2,750,574,350			100	4,242,107,000
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12	39,600,000.00			12	38,700,000.00



	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		7814	2,584,281,000.00			7900	2,533,188,000.00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		7	102,693,350.00			7	1,647,719,000.00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1	15,000,000.00			1	22,500,000.00



	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		70	9,000,000.00				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif		80	544,000,000			80	582,500,000

	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		37	544,000,000.00			37	568,320,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	IPK		51.97	6,193,900,000.00	DAU/DAK		52.42	6,330,900,000.00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif		82	6,193,900,000.00			86	6,330,900,000.00



	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		22	3,000,000.00			22	30,000,000.00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,		20	300,000,000.00			20	360,000,000.00

	Akseptor (UPPKA)	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia							
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		60169	5,890,900,000.00			60169	5,940,900,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2025 serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Nomor B/050/345.1/409.3.2/2024 Tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana maka pada Rancangan Awal Renja 2025 Dinas P3APPKB menyusun 10 program, 22 kegiatan, 42 sub kegiatan dengan rincian Rp. 5.596.545,- dari Dana Alokasi Umum dan Rp. 4.889.261.671,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sehingga di tahun 2025 Dinas P3APPKB melaksanakan anggaran sebesar Rp.14.093.101.000,- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten merupakan program yang melaksanakan kegiatan rutin seperti perencanaan penganggaran dan keuangan, administrasi perkantoran seperti surat menyurat, materai, pemenuhan kebutuhan listrik, telpon, air, tabung gas, makan minum, perjalanan dinas, dokumentasi dan dekorasi, majalah, alat listrik, alat kebersihan, ATK dan pembayaran jasa teknis lainnya.

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah bentuk rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program peningkatan kelembagaan perempuan dan anak. Dimana program ini dilaksanakan untuk menyediakan pengarusutamaan gender bagi perempuan dan pengarusutamaan hak anak bagi anak, keterlibatan perempuan dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang terwadahi dalam GOW, meliputi organisasi Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit Yonif 511, Muslimat NU, Fatayat NU, Persit Kodim 0808, Dharma Yukti Karini, WKRI, PERISKA, Pos Indo, Perip, Al Hidayah, Tiara Kusuma, Harphi Melati, Wanita PGRI, HWK, Perwari, WHDI, IBI, IIDI, IGTKI, Salimah, PIFERI, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Perwosi.

Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak merupakan program yang dilaksanakan untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor ke UPT PPA ataupun UPPA (Unit perlindungan



perempuan dan anak yang ada di Polres) untuk mendapatkan pelayanan dan penyelesaian kasus yang dibutuhkan oleh korban dengan program inovasi publik bajuku libas dosa (Pengaduan, konsultasi psikologis, konsultasi hukum, pelayanan kesehatan/visum, pemberian sembako, perlindungan di rumah aman, konsultasi tokoh agama dan rujukan ke pondok pesantren). Program ini juga melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak serta membina tokoh masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya.

Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan (nasional dan daerah) sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan dengan menerapkan prinsip dan kepentingan anak (the best interest of the child). Dengan adanya kelembagaan PUHA diharapkan nantinya kepedulian dan pemahaman mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak anak akan semakin cepat terwujud. Keterlibatan anak dalam organisasi anak terwadahi dalam OSIS, Pramuka, PMR, TPQ, PIK – R.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai sektor dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak, secara up to date dan akurat, maka diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mendukung dan mengisi data indikator dan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah. Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi dan perkembangan) keadaan laki-laki dan perempuan termasuk anak, Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan, serta dapat Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman laki-laki dan perempuan.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah program yang berupaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,



berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan Puspaga atau Pusal Pembelajaran Keluarga.

Program Pengendalian Penduduk adalah pengembangan sistem pengendalian penduduk, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan papan informasi kependudukan di kampung KB, MOU dengan sekolahan untuk membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), menyediakan data keluarga dengan melakukan update data melalui pendataan keluarga setiap tahun sekali oleh para kader pendata di desa dengan bimbingan para PLKB Kecamatan dan penyusunan profil pengendalian penduduk yang berupa Penyusunan parameter kependudukan dan Grand Design pengendalian penduduk & pembangunan keluarga berupa buku yang berisi tentang program pengendalian penduduk, target , dsb selama 5 tahun ke depan, sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan di Kab. Blitar.

Program Pembinaan Keluarga Berencana merupakan program yang diselenggarakan untuk mengendalikan jumlah penduduk, dengan meningkatkan kesertaan ber KB dari Pasangan Usia Subur yang ada melalui kegiatan safari KB secara reguler maupun dengan memanfaatkan momentum yang ada, seperti Safari KB dalam rangka hari ulang tahun TNI, PKK, IBI, Hari Keluarga Nasional, dll yang diselenggarakan di masing – masing Kecamatan ataupun di Rumah Sakit Swasta yang sudah ditunjuk oleh Dinas P3APPKB. Mengoptimalkan kegiatan pelayanan program Bangsa Kencana dengan memberikan sarana prasarana kepada fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) dan balai penyuluh KB, juga dengan memberikan penyuluhan, penggerakan dan pembinaan serta peningkatan operasional Bangsa Kencana kepada kampung KB, balai penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mengadakan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga pada kegiatan kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL), peningkatan ekonomi keluarga pada kelompok UPPKA dan pembinaan remaja melalui kelompok PIK – R.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Blitar
Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana

KODE					URUSAN/ URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18,838,752,000	DAU	88	18,838,752,000
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,792,700		100	2,190,659
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,053,800.00		3	1,314,018.00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						738,900.00		1	876,641.00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,987,517,171		100	3,216,655,612
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,955,026,671.00		24	3,201,562,000.00
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						30,300,000.00		100	14,040,000.00
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2,190,500.00		12	1,053,612.00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						216,622,335		80	113,118,937
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						59,878,150.00		35	19,269,378.00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						11,843,185.00		1	7,955,259.00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						144,901,000.00		85	65,944,300.00



2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175,000,000.00		1	175,000,000.00
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175,000,000.00		1	175,000,000.00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542,002,576		80	534,159,024
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,749,644.00		12	61,309,644.00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466,252,932.00		12	472,849,380.00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,386,889		80	68,170,527
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,311,889.00		7	51,643,527.00
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,075,000.00		7	12,075,000.00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	292,000,000	DAU	70.65	561,401,418
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	246,000,000		95	40,000,255
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	200,000,000.00		31	32,965,823.00
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	46,000,000.00		274	7,034,432.00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	350,000,000		330	521,401,163
2	08	02	2.01	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	350,000,000.00		4	521,401,163.00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	324,978,082.00	DAU/DAK	31.3	324,978,082.00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77,517,522		100	99,000,064
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77,517,522.00		1	99,000,064.00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71,733,490		95.7	34,727,960
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	71,733,490.00		25	34,727,960.00





2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,000,000		17.74	191,250,058
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18,000,000.00		36	191,250,058.00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	13,500,000.00	DAU/DAK	16	17,468,961.00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,500,000		900	17,468,961
2	08	04	2.01	0002	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13,500,000.00		1	17,468,961.00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	30,000,000	DAU/DAK	100	28,598,592
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000		100	28,598,592
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000.00		1	28,598,592.00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3,000,000		Utama	283,765,439
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3,000,000		100	212,624,513
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,000,000.00		6	169,266,225.00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	387,186,988.00	DAK	100	191,037,608.00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66,148,308.00			
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66,148,308.00			
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169,184,510.00		74	65,272,008.00
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	169,184,510.00		75	65,272,008.00



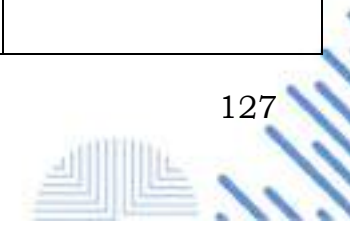


2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151,854,170		17.74	125,765,600
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	32,854,170			
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	119,000,000		2	125,765,600.00
2	14	01			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	672,350,000.00	DAU/DAK	21	50,000,141.00
2	14	01	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	128,000,000.00		2	21,457,400.00
2	14	01	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	128,000,000.00		3	21,457,400.00
2	14	01	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	544,350,000.00		2	28,542,741.00
2	14	01	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	333,600,000.00		1	22,343,028.00
2	14	01	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	198,000,000.00		1	6,199,713.00
2	14	01	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	12,750,000.00			
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5,854,574,350	DAU/DAK	9.05	6,941,307,000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,878,000,000		10	1,616,700,000
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	140,000,000.00		4	42,960,000.00
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1,121,200,000.00		22	980,700,000.00
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	330,000,000.00		12	411,600,000.00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	86,800,000.00		4	150,000,000.00
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra KerjaP	200,000,000.00		4	31,440,000.00





2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	682,000,000		100	500,000,000
2	14	03	2.02	0003	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	682,000,000.00		744	496,000,000.00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,750,574,350		100	4,242,107,000
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39,600,000.00		12	38,700,000.00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,584,281,000.00		7900	2,533,188,000.00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	102,693,350.00		7	1,647,719,000.00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15,000,000.00		1	22,500,000.00
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	9,000,000.00			
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	544,000,000		80	582,500,000
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	544,000,000.00		37	568,320,000.00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6,193,900,000.00	DAU/DAK	52.42	6,330,900,000.00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6,193,900,000.00		86	6,330,900,000.00
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3,000,000.00		22	30,000,000.00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300,000,000.00		20	360,000,000.00
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5,890,900,000.00		60169	5,940,900,000.00





BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2025, dapat kami sampaikan bahwa Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas P3APPKB serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas P3APPKB 2021 – 2026 maka ditetapkan Program dan kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengarahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi, dengan 10 program, 22 kegiatan, 42 sub kegiatan. Program kegiatan yang telah direncanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang tersedia.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dititik beratkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan atau anak dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2024

KEPALA DINAS P3APPKB
KABUPATEN BLITAR



Drs. M. HANKAM INDORO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP.
19670929 199202 1 002

